

## Model Konseptual *Blended Finance* Untuk Penguatan UMKM Melalui Akses Terhadap Jasa Keuangan Di Indonesia

Budi Rustandi Kartawinata

Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom

e-mail : [budikartawinata@telkomuniversity.ac.id](mailto:budikartawinata@telkomuniversity.ac.id)

### Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar untuk menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 97%. Dari data ini, UMKM memiliki potensi yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Karena selain memiliki jumlah yang besar, UMKM juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan. Dari segi kuantitatif, menurut Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pangsa pasar UMKM di Indonesia pada tahun 2017 memiliki pangsa pasar sekitar 99,999% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Usaha mikro di Indonesia dengan aspek permodalan Maksimal 50 Juta Rupiah, dapat menyerap sekitar 107 juta tenaga kerja, sedangkan untuk usaha kecil dapat menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, dan usaha menengah dapat menyerap 3,8 juta tenaga kerja. Revolusi Industri 4.0 menambah tantangan bagi para pemangku kepentingan UMKM untuk dapat mengambil sisi positif dari era disrupsi yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk sektor keuangan sudah mulai dikenal dengan era financial technology yang serba digital, jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara penguatan UMKM, maka masalah permodalan yang disebabkan karena akses terhadap jasa keuangan yang sulit dapat teratasi, ditambah dengan sebuah konsep pembiayaan yang baru dan bersifat kontemporer yang dinamakan *blended finance* tentunya akan semakin besar kemungkinan Indonesia dapat mencapai beberapa tujuan yang tercantum dalam SDGs.

**Kata Kunci:** UMKM; Blended Finance; SDGs

### *Blended Finance Conceptual Model for Strengthening MSMEs through Access to Financial Services in Indonesia*

#### Abstract

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a large potential to contribute 97% of the Gross Domestic Product (GDP). From this data, MSMEs have very important and strategic potential in the national economy. Because in addition to having a large number, MSMEs also spread to remote rural areas. From a quantitative point of view, according to the Ministry of Cooperatives and SMEs, the MSME market share in Indonesia in 2017 had a market share of around 99.999% of the total business operators in Indonesia. Micro businesses in Indonesia with a capital of maximum capital of 50 million, can absorb around 107 million workers, while for small businesses can absorb about 6 million workers, and medium businesses can absorb 3.8 million workers. The Indonesian Revolution 4.0 added to the challenges for MSME stakeholders to be able to take the positive side of the era of disruption. As we know that for the financial sector has begun to be known as the era of digital technology that is completely digital, if it is associated with the goal of sustainable development by strengthening MSMEs, the capital problems caused by access to financial services that are difficult to overcome, coupled with a financing concept new and contemporary nature called blended finance will certainly be more likely that Indonesia can achieve some of the goals listed in the SDGs.*

**Keywords:** MSME; Blended Finance; SDGs

## A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar untuk menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 97%. Dari data ini, UMKM memiliki potensi yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Karena selain memiliki jumlah yang besar, UMKM juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan. Dari segi kuantitatif, menurut Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pangsa pasar UMKM di Indonesia pada tahun 2017 memiliki pangsa pasar sekitar 99,999% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Usaha mikro di Indonesia dengan aspek permodalan Maksimal 50 Juta Rupiah, dapat menyerap sekitar 107 juta tenaga kerja, sedangkan untuk usaha kecil dapat menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, dan usaha menengah dapat menyerap 3,8 juta tenaga kerja. Dari data tersebut, maka sektor usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia ini adalah sektor UMKM.

Potensi yang sangat besar dari keberadaan UMKM di Indonesia beserta dengan kontribusi yang nyata dari sektor UMKM terhadap perekonomian di Indonesia menjadi sebuah alasan yang kuat agar sektor UMKM selalu diperhatikan dan selalu diberdayakan atau dengan kata lain Negara Indonesia selalu hadir untuk pemberdayaan UMKM. Apabila kita perhatikan khususnya usaha mikro, dengan modal maksimal 50 Juta Rupiah, akan tetapi dapat menyerap hampir 89% tenaga kerja produktif, dengan pangsa pasar hampir 100%. Hal ini membuktikan bahwa usaha mikro merupakan sektor yang menjanjikan untuk berkembangnya perekonomian negara, walaupun yang diharapkan adalah berkembangnya status usaha mikro menjadi usaha kecil, lalu usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar. Jika harapan ini terwujudnya, maka suatu saat nanti perekonomian di Indonesia akan semakin berkembang dan bertambah maju dengan

dimulai dari berkembangnya UMKM di Indonesia.

Dari sisi keuangan sektor UMKM di Indonesia seringkali menghadapi rintangan yang dapat menjadi tantangan bagi para stakeholders UMKM untuk menghasilkan solusi sehingga sektor UMKM dapat secara maksimal diberdayakan. Menurut laporan dari Bank Indonesia, tentang perkembangan kredit di sektor UMKM dapat dilihat dari bagan di bawah ini :

**Tabel 1. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kredit	2013	2014	2015	2016	2017
Usaha Mikro	137.797	179.748	199.123	218.511	245.118
Usaha Kecil	193.060	224.348	239.194	264.385	295.643
Usaha Menengah	308.613	363.481	392.338	412.259	449.615

Sumber: Bank Indonesia

Apabila kita lihat dari perkembangan kredit UMKM selama 5 tahun terakhir selalu meningkat, akan tetapi apabila ditanyakan kendala apa yang dihadapi para pelaku UMKM, hampir seluruhnya mengatakan kesulitan permodalan, hal ini menjadi sebuah fenomena yang perlu kejelasan sehingga memperoleh solusi mengenai kendala permodalan agar keberadaan UMKM dapat berlanjut apalagi saat ini, dunia sedang hangat dalam pembahasan Sustainable Development Goals (SDGs) dimana dalam tujuan (goal) 8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tujuan (goal) 9 yaitu pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur serta tujuan (goal) 10 yaitu pengurangan ketimpangan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor UMKM, dimana ketika UMKM di Indonesia dapat diberdayakan dan menjadi kuat, maka dapat dipastikan tujuan (goal) 8,9,dan 10 yang tertuang dalam SDGs dapat tercapai.

Revolusi Industri 4.0 menambah tantangan bagi para pemangku kepentingan UMKM untuk dapat mengambil sisi positif dari era disrupsi yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk sektor keuangan sudah

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

mulai dikenal dengan era financial technology yang serba digital, jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara penguatan UMKM, maka masalah permodalan yang disebabkan karena akses terhadap jasa keuangan yang sulit dapat teratasi, ditambah dengan sebuah konsep pembiayaan yang baru dan bersifat kontemporer yang dinamakan blended finance tentunya akan semakin besar kemungkinan Indonesia dapat mencapai beberapa tujuan yang tercantum dalam SDGs.

## Kajian Literatur Terdahulu

Menurut Evita Martha Dewi (2018) menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan permodalan, para pelaku UMKM seringkali menggunakan jasa rentenir seperti contohnya di Propinsi Jawa Barat dimana 40% dari 6 juta pelaku UMKM meminjam dana ke rentenir dan lebih dari satu jutanya merupakan pelaku usaha mikro. Begitu kuatnya cengkeraman para rentenir kepada para pelaku UMKM sangat mengkhawatirkan terlebih dengan berkembangnya era financial technology, telah merubaha model bisnis para rentenir itu menjadi bisnis pinjaman on-line (pinjol) yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dengan bunga yang sangat tinggi, para rentenir dengan topeng online ini sulit untuk dideteksi.

Pemerintah sesungguhnya sudah mengeluarkan program yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana pembiayaan KUR ini dilakukan oleh perbankan nasional yang diperintahkan untuk menyediakan dana kredit bagi KUR sebesar 20% dari total kreditnya. Akan tetapi nampaknya program pemerintah melalui KUR ini tidak tepat sasaran, karena hanya dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan menengah dimana permodalannya lebih dari 50 juta Rupiah. Sedangkan pelaku usaha mikro dengan permodalan maksimal 50 juta rupiah hanya 22% yang dapat menikmati program KUR dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa program KUR menjadi tidak efisien dan ketidakefisienan ini disebabkan adanya gap antara pihak perbankan dengan pelaku usaha mikro dalam hal syarat pembiayaan. Sehingga menurut Evita Martha Dewi (2018) mengungkapkan program yang bernama

Integrasi Perbankan (InBank) dimana menggabungkan keunggulan dan meminimalkan kelemahan dari lembaga keuangan untuk menjangkau pelaku UMKM, adapun pemangku kepentingan yang berperan adalah lembaga keuangan mikro, bank umum, dan perusahaan fintech.

Menurut Wilantara dan Indrawan (2016) *Socialentrepreneurship* memanfaatkan inovasi, sumber daya dan kesempatan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan dengan pendekatan kewirausahaan. Fokus usaha diarahkan pada transformasi sistem pemberdayaan masyarakat dan menghilangkan penyebab kemiskinan, ketidakmerataan, kerusakan lingkungan dan kemanusiaan. Untuk menciptakan penguatan UMKM di Indonesia, *Socialentrepreneurship* perlu diciptakan untuk bias saling bersinergi dengan para pemangku kepentingan yang lain sehingga tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang termaktub dalam SDGs dapat dicapai.

Menurut OECD (2018) Blended finance didefinisikan "sebagai penggunaan strategis dana pembangunan dan dana filantropi untuk memobilisasi aliran modal swasta ke pasar-pasar baru dan perbatasan", menghasilkan hasil positif bagi investor dan masyarakat.



Sumber: OECD

Gambar 1. Blended Finance

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa blended finance adalah sebuah skema pembiayaan yang melibatkan sumber dana dari dana pembangunan dan dari pihak swasta ditambah dengan dana filantropis untuk dijadikan sumber pembiayaan untuk tujuan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

pembangunan yang berkelanjutan. Blended Finance akan berbeda dengan konsep public private partnership (PPP) dimana PPP merupakan sinergi dari dua pihak yaitu pihak swasta dan pihak pemerintah, sedangkan dalam blended finance yang berperan lebih dari dua pihak, bahkan ditambah dengan gelongan filantropis yang ikut bergabung dalam blended finance untuk dapat menciptakan keberlanjutan pembangunan.

## Kebaruan Ilmiah

Model konseptual blended finance untuk penguatan UMKM melalui akses terhadap jasa keuangan merupakan sebuah karya ilmiah untuk mendapatkan sebuah model yang dapat dijadikan skema blended finance bagi UMKM sehingga menciptakan solusi dari masalah pemodal yang dihadapi oleh UMKM terutama usaha mikro.

## Pemasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan sebuah model konseptual untuk penguatan UMKM melalui akses terhadap jasa keuangan menuju SDGs.

## Tujuan Kajian Artikel

Tujuan penelitian ini adalah menentukan model dan skema penguatan UMKM melalui akses terhadap jasa keuangan menuju SDGs.

## B. PEMBAHASAN

Pengembangan model konseptual blended finance untuk penguatan UMKM melalui akses terhadap jasa keuangan menggunakan pendekatan Soft System Method (SSM). Dengan pendekatan SSM pengembangan model konseptual akan terdiri dari beberapa tingkatan yaitu :

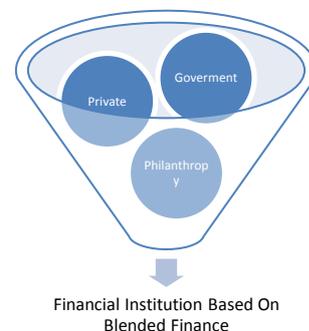
### Tahap 1 : Situation Considered Problematic

Situasi problematik yang dimaksud adalah masalah permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM terutama usaha mikro yang selalu memiliki masalah kekurangan modal dan ketiga mencoba mengajukan pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan dan perbankan selalu tidak terpenuhi karena beberapa hal sehingga walaupun pemerintah telah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pada pelaku

UMKM akan tetapi bagi pemilik usaha mikro tetap saja sulit untuk mendapatkan akses ke jasa keuangan untuk mendapatkan kredit penambahan modal. Hal ini menyebabkan pemilik usaha mikro terjatuh jebakan yang dibuat oleh para rentenir yang dengan mudahnya memberikan akses kepada para pemilik usaha mikro untuk mendapatkan penambahan modal, akan tetapi dengan bunga yang sangat besar dan tidak akan mungkin dapat dilunasi, sehingga usaha mikronya terpaksa harus ditutup bahkan berpengaruh pada kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

### Tahap 2 : Problem Situation Expressed

Masalah yang terjadi saat ini adalah kurangnya akses menuju jasa keuangan dari pelaku UMUM terutama usaha mikro yang disebabkan adanya keengganan dari pihak perbankan formal untuk memberikan kredit modal usaha dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan berbagai macam alasan, diantaranya factor moral hazard dari para pelaku usaha mikro dan pengelolaan keuangan usaha mikro yang tidak dapat membuat laporan keuangan usaha, dimana hal tersebut menjadi salah satu syarat untuk kepentingan penilaian kelayakan pemberian kredit. Mengatasi permasalahan ini, maka blended finance dapat menjadi salah satu solusi, dimana dalam blended finance, sumber daya untuk penguatan usaha mikro melalui kredit modal kerja bisa didapat dari percampuran yang bersumber dari dana pemerintah, dana pihak swasta dan dana yang berasal dari golongan filantropi. Penyatuan dana ini dalam membentuk sebuah lembaga jasa keuangan yang berbasis blended finance.



Gambar 2. Financial Institution

Sumber : data diolah

3. Tahap 3 : Root Definition of Relevant System  
Setelah situasi problema dijelaskan, untuk

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

memperbaiki situasi problematik diperlukan formula dalam bentuk root definition memperbaiki berbagai pandangan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan CATWOE Analysis, seperti di bawah ini :

**Tabel 2. CATWOE Analysis**

Customers	Pelaku Usaha Mikro (UMKM)
Actors	Pemerintah, Swasta, Golongan Philantropy, Lembaga fintech
Transformation	Keberhasilan lembaga keuangan dengan basis blended finance
Worldview	UMKM di Indonesia menuju SDGs
Owners	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Environmental Constrain	Etika bisnis, perilaku masyarakat, kemitraan

## Tahap 4 : Conceptual Model

Dari CATWOE Analysis, maka diperoleh model konseptual blended finance untuk membuat sebuah lembaga keuangan yang bertujuan memberikan akses jasa keuangan bagi para pelaku UMKM terutama usaha mikro dalam mendapatkan tambahan modal kerja.



**Gambar 2. Model Konseptual Blenden Finance**

Sumber: data diolah

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Model blended finance akan menentukan berhasil atau tidaknya usaha untuk memberikan penguatan bagi UMKM untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang tertera pada SDGs, terutama tujuan 8,9, dan 10 yang menitikberatkan pada pembangunan perekonomian yang berkelanjutan.

Dengan adanya blended finance maja ketidakefisienan program pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjadi karena adanya kesenjangan antara lembaga keuangan yang formal dengan para pelaku usaha mikro.

Lembaga keuangan yang berbasis pada model blended finance akan meningkatkan akses jasa keuangan bagi pelaku usaha mikro.

Sampai saat ini belum ada sebuah model atau skema yang pasti yang dapat digunakan pada blended finance, akan tetapi ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat melakukan pemodelan-pemodelan yang tentunya sesuai dengan kultur atau budaya bangsa dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan golongan yang bergerak dalam bidang social.

## REFERENSI

Abyan, M.A. 2018. Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia Dalam Melakukan Transaksi Financial. FIK Universitas Indonesia. p 10

Christi, S dan Barberis, J. 2016. The Fintech Book. Wiley. p 122-250

Dewi, M.Evita 2018. Inbank: Strategi Integrasi Lembaga Keuangan Untuk Penyaluran Kredit Mikro Di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia

Gidwani, G. 2017. What Are The Best P2P Lending Platform In India? <https://www.quora.com/What-are-the-best-peer-to-peer-lending-platforms-in-India>

Iman, N. 2017. Fintech, Islamic Finance, And Its Challenges. Indonesia Sharia Economic Festival. p 7

Kajian Indikator Lintas Sektor. 2016. Potret Awal Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. BPS

Thorat, U. 2007. Financial Inclusion-the Indian experience. Financial Inclusion Conference.p 5-6

OECD (2018), *Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals*, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264288768->

Wilantara, R. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM* [www.rullyindrawan.wordpress](http://www.rullyindrawan.wordpress).

 3.0 | 2019



STIA LAN  
BANDUNG

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI